

Peran Lembaga Pendidikan Islam Nahdlatul Ulama dalam Perubahan Sosial

Salwa Cantika Sabillah*, Masitah Effendi
Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author: salwacantikasabillah28@gmail.com

Article history

Dikirim:

12-09-2025

Direvisi:

21-11-2025

Diterima:

26-11-2025

Key words:

Nahdlatul Ulama; Sosial;
Institute

Abstrak: Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Islam melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, madrasah, dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU). Artikel ini membahas sejarah, visi misi, serta tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan NU dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi. Selain itu, dibahas pula kontribusi NU dalam pembentukan karakter, penyebaran nilai toleransi, dan menjaga keharmonisan sosial. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan secara deskriptif dan interpretatif untuk memahami makna di balik data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumen. menyoroti problematika manajemen, sumber daya manusia, kurikulum, dan pendanaan yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan pendidikan NU serta strategi revitalisasi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan NU.

PENDAHULUAN

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai satu organisasi Islam besar yang ada di Indonesia yang telah memberikan peran yang penting dalam peningkatan pendidikan pada negara ini. Hal ini dilihat dari didirikannya berbagai lembaga pendidikan Islam berupa pesantren, yang sebagian besar berada di lingkungan pesantren seperti Lirboyo, Sidogiri, Salafiya Safi'iyah, dan Pondok Pesantren Tebu Ireng, serta lain-lain, oleh para pendiri NU. Namun demikian, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut termasuk yang didirikan lebih dahulu dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain di Indonesia (Nasrullah, N., Rama, B., & Achruh, A. 2023).

Nahdlatul Ulama (NU) dibangun pada tahun 1926 dan sejak saat itu aktif berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. NU mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan LP Ma'arif NU yang punya fungsi sebagai pelaksana pada kebijakan pendidikan organisasi tersebut. Pendidikan yang dikembangkan NU berlandaskan nilai Ahlussunnah wal Jama'ah serta bertujuan untuk membentuk generasi berakhlak mulia. Namun, lembaga pendidikan NU menghadapi sejumlah tantangan, antara lain manajemen yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya dukungan dana. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi permasalahan dalam pendidikan NU dan merumuskan strategi revitalisasi yang diperlukan. Berbagai aktivitas pendidikan NU, seperti kesuksesan pesantren, majlis ta'lim, dan madrasah, menjadi wujud kekuatan kelembagaan NU dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia (Fathih & Amrullah, 2022). Selain itu,

pendirian pesantren dan madrasah yang berada di bawah pegangan NU menjadi suatu faktor penting pencapaian NU dalam menggerakkan partisipasi masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dalam mendidik umat Islam yang berakhlak mulia, bermoral, dan berpegang pada nilai-nilai Ahlulsunah wal Jama'ah. Dengan demikian, melalui kegiatan pendidikan yang dijalankan, NU berhasil menjadi salah satu organisasi Islam besar dan memberi pengaruh di Indonesia.

Selaku organisasi besar yang ada di Indonesia NU tetap berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap dinamika dan peningkatan pendidikan Indonesia. Hal ini dibuktikan sudah banyak pesantren serta madrasah yang dikendalikan oleh NU dengan menyadari tuntutan zaman dan kebutuhannya masyarakat yang selalu berubah. Oleh karena itu NU tetap berkomitmen terhadap inovasi dan peningkatan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Pada mulanya hanya ada dari pesantren dan madrasah informal, sekolah formal seperti MI, MTs, dan MA yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan, dan diperluas ke jenjang pendidikan tinggi oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Berbagai inovasi pendekatan kemajuan pendidikan NU ditujukan untuk mewujudkan pendidikan Islam yang kompetitif dan berkualitas serta memenuhi segala kebutuhan modern masyarakat agar mampu bersaing di kancah internasional atau dunia.

Berbagai upaya yang dilakukan NU, seperti pendirian pesantren, majelis taklim, dan madrasah, menunjukkan komitmen NU dalam memperkuat pendidikan agama dan sosial di tengah masyarakat. Kontribusi tersebut menjadikan NU sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dan sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. NU juga terus menjaga komitmennya terhadap inovasi dan adaptasi perkembangan zaman, termasuk pendirian lembaga pendidikan formal dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi yang dikelola oleh LP Ma'arif NU.

Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai peran, dinamika, dan tantangan lembaga pendidikan NU dalam konteks perubahan sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menelaah berbagai sumber literatur, dokumen resmi, serta kajian akademik yang relevan untuk menggambarkan kondisi aktual lembaga pendidikan NU. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi problematika yang dihadapi, seperti kendala manajemen, kurikulum, sumber daya manusia, dan pendanaan, serta merumuskan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan NU.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi literatur serta analisis dokumen. Data dicapai dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi NU. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi problematika, tantangan, dan strategi pengembangan pendidikan NU. Teknik pengumpulan data melalui dengan membaca dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, pengumpulan dokumen resmi serta arsip yang berkaitan, dan menganalisis tulisan-tulisan yang membahas peran dan tantangan LP Ma'arif NU. Data yang diterapkan dalam penelitian ini bersumber dari buku dan artikel ilmiah yang membahas visi misi dan pengembangan

NU, referensi dari tokoh dan pengurus NU yang memerikan gambaran tentang kondisi dan menejemen Lembaga Pendidikan NU.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nahdlatul Ulama Dan Lembaga Pendidikan Islam

1. Sejarah dan Latar Belakang Perkembangan Pendidikan Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) dibangun pada 31 Januari 1926 atau pada waktu yang sama dengan 16 Rajab 1334 H di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama para ulama tradisional dari Jawa Timur (*Konsep-Pendidikan-Karakter-Nahdlatul-Ulama-Nu, n.d.*). Sebelum berdirinya NU, terdapat beberapa organisasi pendahulu, yaitu Nadhlatuttujjar pada tahun 1918 sebagai gerakan ekonomi berbasis desa, *Taswirul Afkar* pada tahun 1922 yang bergerak di bidang keilmuan dan kebudayaan, serta *Nadhlatul Watan* pada tahun 1924 yang merupakan gerakan politik melalui pendidikan. Dari pada ketiga gerakan ini lahir tiga pilar utama NU, yakni: (1) wawasan ekonomi yang berfokus pada masyarakat, (2) wawasan keilmuan, dan (3) wawasan kebangsaan.

Salah satunya program tetap Nadhatul Ulama ialah madrasah ataupun sekolah yang disebut Maarif. Seluruh program kegiatan Nahdhatul Ulama bukan sekadar ekspresi pengamalan ajaran agama Islam. Demikian pun tugas madrasah dan sekolah pada hakikatnya adalah melakukan perintah agama dalam bidang pendidikan serta peran Nadhatul Ulama didalam upaya mencerdaskan negara dan umat. Karena merupakan organisasi yang benar - benar tumbuh dari bawah dan mengakar di tanah umat Islam Indonesia, maka sebagian besar madrasah Maarif Nadhatul Ulama diberdirikan, dan dibiayai oleh masyarakat sendiri. Nahdhatul Ulama melebur dengan Ma'arif dengan kemauan mengkoordinasikan, membimbing dan mengawasi (Rozi, 2025).

NU mendirikan lembaga departemen pendidikan yang telah dinamai dengan nama Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP. Ma'arif NU). Departemen tersebut tetap berada di bawah naungan NU. Lembaga ini ialahh salah satu organisasi di lingkungan NU yang didirikan dengan tujuan mewujudkan filosofi pendidikan NU. Badan ini berperan sebagai penggerak aturan pendidikan NU pada tingkat pengurus umum, pengurus daerah, pengurus cabang, dan pengurus cabang perwakilan. LP Maarif NU berdiri pada masa penjajahan Belanda, ketika saat umat Islam berada dalam keadaan yang amat sangat memprihatinkan, kalah jauh dengan lembaga pendidikan yang dikuasai Belanda. LP Maarif NU bertanggung jawab menerapkan kebijakan NU di bidang pendidikan dan pendidikan formal dan nonformal, kecuali pesantren. Sementara itu, pesantren di lingkungan NU didukung oleh RMI (*Rabita Ma'ahid al - Islam*) yang mempunyai misi menerapkan pedoman NU di bidang sistem pengembangan pesantren. Pada tahun 1970 - an konsentrasi aktivis pada aktivitas politik menjadi satu penyebabnya lemahnya sistem manajemen pendidikan NU. Maarif, sebuah organisasi pendidikan yang bertanggung jawab mengelola madrasah dan sekolah sejak awal tahun 1970 – an. Saat ini, 30% anggotanya sudah keluar dari lembaga NU. Ketakutan terhadap ekstremisme politik meninggalkan bekas yang mendalam pada tahun 1970 - an dan menghantui pada bidang pendidikan umum. Saat itu, pihak sekolah menyembunyikan hubungannya dengan NU karena takut akan adanya perbuatan



diskriminatif. Saat itu kata MINU (*Madrasah Ibtidaiya Nahdlatul Ulama*) sudah tidak terdengar lagi. Mereka memakai nama yang kurang, seperti mazhab “Wahid Hasyim”, nama mantan menteri agama (Ulum & Wahid, 2019).

Setelah tahun 1984, mendirikan LP dengan tujuan memulihkan madrasah yang hilang, atau bersembunyi di balik nama tersebut. Maarif NU harus menyatakan identitasnya dengan jelas dan mendaftar ulang ke lembaga pendidikan Maarif NU. Namun, permintaan ini tampaknya baru terwujud pada tahun 1987, dan berakibat buruk bagi upaya NU dalam memperoleh dana yang diperlukan untuk mengoperasikan sekolah - sekolahnya. Jika dicermati mengapa gerakan daftar ulang madrasah dan sekolah tidak berhasil, setidaknya ada tiga faktor, yaitu: 1) Kurangnya kemampuan finansial lembaga pendidikan Maarif NU. 2) Kurangnya kendali atau kemampuan mengelola. 3) Tradisi ulama terbiasa dengan kebebasan. Karena tradisi Kiai NU, banyak di antara mereka yang enggan mengikuti proses pendaftaran meski mereka menganggap dirinya bagian dari keluarga NU. Upaya untuk kembali ke peran yang sama seperti sebelumnya di bidang agama terus dilakukan, namun kemajuannya berjalan lambat. Pada tahun 1980 - an, program sekolah disambut baik oleh pihak berwenang dan semakin mudah untuk mendapatkan izin pembukaan sekolah baru. (Dianita et al., 2019).

Bpk. Muhammad Kholil selaku pimpinan di LP. Ma'arif NU Surabaya mengatakan bahwa: ” *Sebagai Lembaga yang tertinggi dan yang mengurus Pendidikan itu LP. Ma'arif NU, maka LP. Ma'arif sendiri didirikan pada tanggal 19 september 1929 yaitu 3 tahun setelah NU berdiri. Karena itu urusan terkait Pendidikan maka diserahkan ke LP. Ma'arif yang baik buruknya Pendidikan NU LP. Ma'arif sendiri yang mengurusnya. LP. Ma'arif NU itu berbeda dengan Lembaga yang ada di Muhammadiyah. Kalo di Muhammadiyah tersentralis seperti contohnya sekolah – sekolah tertentu yang mendirikan organisasi Muhammadiyah sendiri. Sebaliknya, sekolah NU itu NU sendiri mendirikan orang per - orang di tingkat Pendidikan lalu diayomi. Mereka bisa mengelola sendiri semuanya, mulai dari operasional, keuangan, bahkan kerorganisasian pengurus sendiri. Jadi menaungi sekolah – sekolah Islam yang ada, bahkan ada sekolah yang didirikan NU dan sekolah tersebut mengatasnamakan NU atau sekolah tersebut memiliki ciri khas Amaliyah - nya NU tetapi tidak ikut LP. Ma'arif NU. Tentunya itu sangat banyak sekali, padahal didirikan oleh pengurus NU, didirikan oleh personal – personal NU tapi sekolah tersebut mengurus notarisnya sendiri, mengelola sendiri tapi tidak ikut LP. Ma'arif NU. Ada 2 tipe: 1) Ada sekolah yang memang menjadi kepemilikan LP. Ma'arif tapi tidak banyak. 2) Ada sekolah yang didirikan oleh orang – orang NU setempat tapi sekolah tersebut dibawah naungan LP. Ma'arif tetapi terkait apapun yang dilakukan di sekolah tersebut dikelola sendiri padahal SK dari LP. Ma'arif. Oleh sebab itu meskipun sekolah – sekolah islam banyak tapi tidak semua dibawah naungan LP. Ma'arif NU. Contoh: MTS di Surabaya kurang lebih 50 sekolah tetapi yang dibawah naungan LP. Ma'arif hanya 2 sekolah. Seperti yang telah dijelaskan di atas, NU nampaknya berupaya keras untuk mencerdaskan anak - anak bangsa, khususnya generasi Muslim kelas menengah ke bawah. Berbagai institusi pendidikan telah didirikan di Timur Tengah, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.*



2. Visi dan Misi NU dalam Pendidikan

Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat dan mendukung visi serta misi NU, terutama dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, sejak didirikan, para pimpinan NU telah menginisiasi berbagai program unggulan. Salah satunya adalah serangkaian gerakan pionir yang menjadi dasar bagi tiga pilar utama NU. Gerakan pertama adalah upaya ekonomi berbasis masyarakat melalui *Nadhlatus Tujjar* (1918), kemudian *Tashwirul Afkar* (1922) yang menekankan pengembangan pengetahuan dan budaya, serta *Nahdlatul Wathan* (1924) yang berbentuk pergerakan politik dengan penekanan pada pendidikan. Ketiga inisiatif tersebut berbarengan dengan pendirian NU pada 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1334 H. Inilah asal-usul pembentukan tiga pilar kunci NU, yaitu: 1) Ekonomi Umat, 2) Keilmuan, Sosial, dan Budaya, serta 3) Kebangsaan (Mawasti & Adli, 2018)

NU akhirnya bekerjasama dengan lembaga-lembaga seperti Lembaga Dakwah, Lembaga Pendidikan Ma'arif, Lembaga Sosial Mabarat, Lembaga Pengembangan Pertanian, dan sebagainya untuk mewujudkan ketiga pilar tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mapan. Upaya NU untuk mewujudkan salah satu pilar penting dalam bidang pendidikan seperti pembangunan pertanian juga terlihat ketika NU telah sah berdiri sebagai Jamiyah pada tanggal 13 Januari 1926, yang diwakili dengan banyaknya Madrasah yang didirikan NU yang letaknya bersebelahan dengan pesantren ini sudah ada sejak lama dan akarnya ada di Indonesia. Karena adanya beberapa lembaga pendidikan di lingkungan pesantren, maka NU pada kongresnya yang kedua pada tahun 1927 telah membahas permasalahan penyempurnaan metode pendidikan di pesantren dan madrasah yang berada di bawah yurisdiksinya. Pondok pesantren merupakan satu - satunya basis lembaga pendidikan NU yang berprestasi pada awal perkembangannya. Barulah ketika terjadi reformasi pendidikan di Indonesia dengan hadirnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan Swasta (PTAI) pada tahun 1950, Proyek Wajib Belajar Madrasah (WBM) pada tahun 1958, dan Surat Keputusan Tiga Menteri pada tahun 1975. Sekolah dan lembaga, termasuk NU, memulai transformasi dengan menyesuaikan diri dengan tuntutan padazaman dan kebutuhan masyarakat, antara lain melalui pembentukan sistem madrasah formal yang belum pernah diterapkan sebelumnya (Anisyah et al., 2023).

LP Maarif didirikan NU sebagai bagian dari upaya Nah'dlatul Ulama dalam melaksanakan perintah pada keagamaan di bidang pendidikan, serta bersebagai bagian dari upaya NU dalam menunjang terwujudnya bangsa yang cerdas. LP Maarif Perkembangan NU tidak terlepas dari penglihatan oleh bagian masyarakat Indonesia yang memandang NU sebagai oorganisasi yang dekat dengan masyarakat. Banyaknya yang mengatakan bahwa NU adalah organisasi yang muncul dari masyarakat, yang berakar pada komunitas Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan mayoritas madrasah dan dekolah dibawah naungan Nahdatul Ulama, yang berjumlah 6.000 lembaga Pendidikan sebagian di antaranya didirikan, dibangun, serta dibiayai oleh Masyarakat yang siap dikoordinasikan, dibimbing, dan di awasi oleh LP Ma'rif NU.

3. Jenis dan Jenjang Lembaga Pendidikan Islam NU

Menurut kategorinya, lembaga pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama, yakni lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan non-formal.

a. Lembaga Pendidikan Formal

Merupakan tempat terbaik untuk memperluas pengetahuan dan cara termudah untuk mengembangkan generasi muda didukung oleh pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu, sekolah ialah suatu lembaga yang mempunyai organisasi yang terstruktur dengan jelas, segala kegiatannya direncanakan secara sadar, yang disebut kurikulum (Syarif et al., 2015). Aspek penyelenggara: 1) Sekolah negeri, yakni institusi Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah mencakup penyediaan fasilitas, anggaran, serta rekrutmen guru. Hal ini di atur dalam UUD 1945 Pasal 31, dengan pengelolaan lebih lagi lanjut dengan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang islam Pendidikan nasional, Dimana sekolah umum berada di bawah kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Depdikbud), sementara sekolah berbasis agama islam brada di bawah kementian agama. 2) Sekolah swasta, yaitu sekolah yang di kelola oleh pihak non-pemerintah, seperti Lembaga swasta. Ketentuan ini di sebutkan dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 47 ayat (1), yang menyatakan: “masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan seluas-luasnya dalam memberikan kontribusi serta dalam proses pelaksanaan pendidikan nasional” (Departemen Agama RI, 1991 – 1992). Sekolah swasta ini di kategorikan menjadi: disamakan, diakui, terdaftar, dan tercatat, baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta menerapkan mekanisme akreditasi.

Segi jenjang pendidikann: menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal terbagi menjadi tiga tingkatan utama, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 1) Pendidikan Dasar, yang mencakup: Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah serta SMP/Madrasah Tsanawiyah. 2) Pendidikan Menengah, yang meliputi: Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, SMK/Madrasah Aliyah Khusus. 3) Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas: akademi, institut, sekolah tinggi, dan universitas.

Berdasarkan sifatnya: 1) Sekolah Umum, yaitu institusi Pendidikan yang belim megarahkan siswa ke spesialisasi pekerjaan khusus. Fokus utamanya adalah persiapan untuk lanjut ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, meliputi: SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. 2) Sekolah Kejuruan, yakni lembaga pendidikan yang dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan spesifik di bidang tertentu, seperti: SMEA, MAPK (MAK), SMKK, STM dan sebagainya.

b. Lembaga Pendidikan Informal

Kegiatan pendidikan informal ini tidak memiliki struktur organisasi yang kaku, tidak terikat pada jadwal program tetap, serta tidak melibatkan proses evaluasi formal. Meskipun demikian, Pendidikan informal semacam ini tetap memberikan dampak signifikan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Pendidikan ini bisa terjadi di luar lingkungan

sekolah, seperti di keluarga formal di sekolah, misalnya saat jam istirahat, waktu makan siang di kantin, atau ketika guru menunjukkan sikap tertentu selama mengajar maupun saat guru memberikan respon khusus terhadap siswa. Pendidikan informal ini memiliki sasaran tujuan yang spesifik, terutama dalam konteks lingkungan rumah tangga/keluarga, komunitas desa, tradisi adat, dan sejenisnya.

c. Lembaga Pendidikan Non – Formal

Lembaga Pendidikan terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebut dengan sebagai jalan pendidikan non-formal ini bersifat fungsional serta praktis, dengan tujuan utama untuk mempertinggi kelebihan dan keterampilan kerja bagi peserta didik guna mendukung peningkatan kualitas hidup mereka. Pendidikan non-formal memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Diselenggarakan secara sengaja di luar lingkungan sekolah formal. 2) Pesertanya umumnya adalah individu yang telah putus sekolah atau dikeluarkan dari sistem pendidikan formal. 3) Tidak terikat pada jenjang pendidikan tertentu, dengan program yang bersifat jangka pendek. 4) Peserta didiknya cenderung beragam dan tidak sepenuhnya homogen. 5) Memiliki jadwal belajar tetap, metode pengajaran yang formal, serta evaluasi yang terstruktur dan sistematis. 6) Kurikulumnya bersifat aplikatif dan difokuskan pada bidang-bidang spesifik. 7) Pengembangan keterampilan kerja menjadi prioritas utama sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan taraf kesejahteraan hidup.

4. Peran Lembaga Pendidikan Islam NU dalam Perubahan Sosial

a. Pembentukan Karakter dan Akhlak Masyarakat

Pembentukan karakter itu salah satu harapan utama dalam pendidikan. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Tahun 2003 mengemukakan bahwasannya harapan dalam pendidikan ialah menambah potensi peserta didik agar mempunyai kepintaran serta kepribadian dan akhlak yang baik dan mulia. Pendidikan karakter pada anak usia dini bertujuan menanamkan perilaku positif sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu pengelolaan dan hasil pendidikan yang diarahkan pada pembuatan karakter. Melalui pendidikan karakter, setiap individu diinginkan mampu secara mandiri mengembangkan dan memanfaatkan pengetahuannya, serta mengkaji, menginternalisasi, dan mengkhususkan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari (Hawari et al., 2023).

Terlihat jelas pada pendidikan yang dikembangkan oleh Nahdatul Ulama (NU) jelas berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai ciri khas dan identitas organisasi, pendidikan keagamaan ini menjadi dasar karakter dan model NU dalam berperan serta di masyarakat nyata. Untuk membentuk pendidikan karakter yang baik, diperlukan keterlibatan aspek pengetahuan yang memadai serta perilaku yang positif.

Pendidikan karakter dalam pandangan islam mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Analisis menunjukkan bahwa penerapan pendidikan berakhlak merupakan hal yang sangat esensial. Sejak awal, Nahdatul Ulama menegaskan dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah wal

Jama'ah dan menggunakan metode Al Qiyas (Saefudin, A. 2021). Dalam indikator Ahlus Sunnah wal Jama'ah, terdapat lima prinsip utama yang dijadikan landasan Nahdatul Ulama dalam berinteraksi dengan masyarakat, yang dikenal dengan konsep Mabadiu Khaira Ummat yaitu:

- 1) At – Tawassuth, yang berarti sikap moderat dengan menepatkan diri di Tengah antara dua ekstrem dalam berbagai masalah dan situasi dalam mencapai kebenaran.
- 2) Al I'tidal, Yang bermaksud tegak lurus, tidak lebih condong kekiri atau kekanan.
- 3) At – Tasamuh, Yang bermaksud bersikap toleran pada pihak lain, lapang dada mengerti sikap pendirian dan kepentingan pihak lain.

Konsep pendidikan karakter Nahdatul Ulama (NU) sebagaimana ditetapkan Mukhtamar Magelang tahun 1939, menempatkan prinsip-prinsip hubungan sosial dan kemanusiaan yang terkandung dalam “Mabadi Khaira Ummah”. Dalam pandangan ini, kehidupan manusia setidaknya harus mencerminkan sifat ash - shidqu (kejujuran), menjahui dusta, serta menjaga kesetiaan terhadap janji. Karakter tersebut menjadi landasan utama Nahdatul Ulama dalam membangun prinsip-prinsip relasi sosial (Yugo, 2025)

Pembentukan karakter atau akhlak mulia sebaiknya dimulai sejak masa kanak-kanak, karena hal ini amat krusial untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Peran pendidikan Islam dalam membentuk pribadi manusia sangatlah vital dan sangat diperlukan, sebab melalui pendidikan Islam ini diharapkan lahir generasi muda yang kaffah atau sempurna (Abdurahman., 2025). Keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam sistem pendidikan Indonesia memiliki kontribusi yang sangat signifikan, di mana NU pada awalnya memulai pengabdianya melalui jaringan pesantren-pesantren. Baru pada Mukhtamar ke-13 di Menes, Jawa Barat, strategi pendidikan NU secara resmi ditetapkan, dengan pembentukan Lembaga Ma'arif yang dipimpin oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim saat itu, serta pembagian jalur pendidikan formal menjadi dua, yaitu pendidikan madrasah dan pendidikan sekolah.

b. Peran dalam Penyebaran Nilai – Nilai Toleransi dan Kebangsaan

Pendidikan Agama Islam Aswaja An-Nahdliyah merupakan suatu sistem pendidikan yang dibangun atas dasar falsafah, harapan, dan teori-teori yang dirancang khusus untuk menerapkan praktik pendidikan yang selaras dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah menurut Nahdlatul Ulama. Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam Aswaja An-Nahdliyah yang dijelaskan dalam artikel ini merujuk pada nilai-nilai yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama dalam kehidupan masyarakat. Secara mendasar, pendidikan merupakan proses penguasaan dan penyebaran ilmu yang memungkinkan budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara keseluruhan, manusia menjalankan pendidikan sebagai usaha untuk mendukung, melatih, dan membimbing anak-anak melalui transfer ilmu, pengalaman, kecerdasan, serta keberagaman dari orang tua atau pendidik yang diselaraskan dengan fitrah manusia, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang serta mencapai tujuan utama, yakni kehidupan ideal dengan pembentukan kepribadian unggul.



Pendidikan Islam Aswaja An-Nahdliyah merupakan bentuk pendidikan Islam yang mengacu pada empat karakteristik pokok Ahlussunnah Wal Jama'ah yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Keempat prinsip tersebut, yang selalu diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat (Abrori, M. S., Mispani, M., Setiawan, D., & Khodijah, K. 2022)., meliputi:

- 1) Al-Tawassuth, yaitu sikap mengambil jalan tengah di antara dua pandangan ekstrem (tatharruf), contohnya antara Qadariyyah dan Jabariyyah, antara skeptisisme ortodoks dengan rasionalisme Mu'tazilah, serta antara Sufisme salafi dan Sufisme falsafi.
- 2) Tasamuh berarti menghormati menghargai orang yang memiliki prinsip hidup berbeda, meskipun tidak berarti mengakui atau membenarkan keyakinan tersebut. Tasamuh mencerminkan sikap toleran, saling menghargai, dan tenggang rasa.
- 3) Itidal, adalah sikap tegak lurus, tidak memihak kekanan atau kiri, serta berlaku adil dengan hanya mendukung kebenaran. Sikap itidal sangat terkait dengan prinsip tawasut.

Menurut KH. Aqil Siradj, sikap I'tidal (tegak lurus atau berlaku adil) diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara selalu bersikap adil antara kelompok kaya dan miskin, serta antara kelompok minoritas dan mayoritas. Puncak dari sikap ini ialah suatu bantuk wujud semangat gotong royong dalam menegakkan keadilan.

Penanaman nilai-nilai tawassuth di masyarakat bertujuan menanamkan sikap yang proporsional dan seimbang, tanpa condong ke ekstremisme baik di kiri maupun kanan. Tawassuth sendiri berarti mengambil posisi tengah di antara dua pandangan yang berlebihan, seperti antara Qadariyyah dan Jabariyyah atau skeptisisme ortodoks dengan rasionalisme Mutazilah (Jesika, W., Rahman, A., & Otori, A. R. 2025). Sikap ini juga mengandung nilai moderasi (al-iqtishad) yang mendorong keterbukaan dialog antar berbagai pemikiran. Dengan menekankan sikap tawassuth, Nahdlatul Ulama berusaha menjadi umat yang moderat dan menghindari cara-cara radikal atau ekstrem.

Nahdlatul Ulama berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai tawassuth di tengah masyarakat dengan dua metode utama.

- 1) Melalui metode pemahaman, NU memberikan wawasan kepada masyarakat lewat berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti istighosah, pengajian, dan kegiatan serupa lainnya.
- 2) Metode pembiasaan, yakni membiasakan masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai tawassuth, meliputi:
 - a) menghargai sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip tri ukhuwah Islam;
 - b) menghindari diskriminasi terhadap kelompok manapun serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati;
 - c) memberikan dukungan dan takziah kepada tetangga yang meninggal dunia meskipun berbeda agama; dan
 - d) menunjukkan sikap saling menghormati saat menghadapi perbedaan pendapat.

KH. Said Aqil Siradj menjelaskan bahwa konsep tawasut direalisasikan dalam proses pengambilan keputusan hukum dengan mengharmonisasikan antara nash (teks agama) dan akal (rasio). Secara luas, metode berpikir ini menggabungkan wahyu dan rasio sehingga berjalan secara seimbang dan sinergis. Sikap tawassuth ini berperan sebagai penengah yang mengurangi sikap ekstrem, baik yang berakar pada teks maupun pada rasio. Pandangan tersebut selaras dengan upaya Nahdlatul Ulama dalam menanamkan nilai-nilai tawasut di tengah masyarakat.

Penanaman Nilai-nilai Tasamuh Nahdlatul Ulama mengajarkan masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai tasamuh yang meliputi sikap toleransi, penghargaan, saling menghormati, tenggang rasa, serta sikap tepa selira. Nilai-nilai ini menjadi karakteristik khas NU yang memengaruhi cara pandang dalam menghadapi berbagai masalah. Dalam kerangka nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah, sikap tasamuh dikembangkan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap prinsip kehidupan orang lain dalam masyarakat.

Penanaman Nilai-nilai Tawazun dalam masyarakat, merupakan sikap keseimbangan yang di anut oleh Nahdlatul Ulama, sebagaimana tertera dalam khittah NU tahun 1926. Tawazun berarti menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek, termasuk dalam penggunaan dalil naqli (dalil yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist) dan dalil aqli (dalil yang bersumber dari akal rasional), serta mengembangkan pengawasan terhadap kekuasaan yang ada. Keseimbangan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi seluruh Masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan peran Nahdlatul Ulama dalam menanamkan nilai-nilai tawazun di Tengah masyarakat.

c. Kontribusi dalam Menjaga Keberagaman dan Keharmonisan Sosial

Keharmonisan antar umat beragama merupakan aset penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat, keharmonisan ini bersifat dinamis artinya dapat berubah tergantung pada perilaku yang ditunjukkan. Oleh karena itu, sikap dan tindakan kelompok keagamaan memiliki peran krusial dalam menjaga suasana yang kondusif. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan di Indonesia, sebuah negara yang kaya akan pluralitas budaya dan agama. Berikut adalah beberapa kontribusi utama NU dalam konteks ini:

1) Komitmen terhadap Toleransi dan Kerukunan

NU secara aktif mempromosikan toleransi melalui program inisiatif yang mendukung dialog antaragama, organisasi ini menjadi jalan antar kelompok yang berbeda dan antara umat islam dengan pemeluk agama yang berbeda, dengan tujuan mempererat dan mengurangi konflik

2) Kegiatan Sosial dan Bantuan Kemanusiaan

NU terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang tidak membedakan latar belakang agamanya, beberapa program bantuan sosial seperti bantuan untuk masyarakat kurang mampu itu menunjukkan komitmen NU untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Menanggulangi ekstremisme

Dengan pendekatan moderat, NU berusaha mengurangi potensi ekstremisme dan radikalisme di kalangan umat islam.

Secara keseluruhan, NU berperan sebagai pilar dalam menjaga keberagaman dan keharmonisan di Indonesia, dengan melalui pendidikan dialog antar agama, kegiatan sosial, dan juga menyebarkan nilai-nilai moderat, NU sangat berkontribusi besar dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

5. Tantangan dan Hambatan Lembaga Pendidikan Islam NU dalam Menghadapi Perubahan sosial

Nahdlatul Ulama sebagai Organisasi Masyarakat Islam terbesar tentu saja memiliki lembaga-lembaga dalam berbagai bidang yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri, salah satunya dalam bidang pendidikan yaitu LP Ma'arif NU yang didirikan pada 19 November 1929 dan masih eksis hingga sekarang.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) adalah salah satu institusi pendidikan yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Lembaga ini memegang peran penting dalam penyempurnaan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam komunitas Muslim berbasis tradisional. Dalam konteks perubahan sosial yang dinamis dan kompleks, LP Ma'arif menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang signifikan (Afif, N., Zamzami, M. A., Mukhtarom, A., & Qowim, A. N. 2022).

Dalam jangka waktu hampir 1 abad yang dilalui oleh LP Ma'arif NU sendiri, tentu saja lembaga ini berhasil dalam menghadapi perubahan sosial dan zaman hingga saat ini sehingga dapat bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Berikut tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh LP Ma'arif NU:

1. Tantangan Perubahan Sosial dalam Konteks Pendidikan

Perubahan sosial fokus pada transformasi yang terjadi dalam struktur dan pola masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini dipicu oleh perkembangan teknologi, globalisasi, urbanisasi, dan percepatan mobilitas sosial. Dalam konteks ini, tantangan LP Ma'arif NU yaitu:

a) Adaptasi terhadap Teknologi Pendidikan

Kemajuan pada teknologi yang telah membawa perubahan besar dengan berbagai cara mewujudkan pendidikan. LP Ma'arif sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti akses internet yang tidak merata di daerah terpencil, kurangnya perangkat digital, dan minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik dalam menggunakan teknologi.

b) Globalisasi dan Kompetisi Pendidikan

Globalisasi telah memperluas akses terhadap berbagai model pendidikan global. LP Ma'arif perlu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya, termasuk sekolah-sekolah modern dengan kurikulum berbasis internasional. Tantangan ini menuntut LP Ma'arif untuk tetap relevan sambil menjaga identitas lokal dan nilai-nilai Islam Ahlul Sunnah wal Jama'ah (Aswaja).

c) Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Masyarakat modern cenderung menginginkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, tetapi juga keterampilan yang dapat meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi. LP Ma'arif menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pendidikan berbasis agama dengan kebutuhan keterampilan praktis.

d) Urbanisasi dan Perubahan Demografi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota sering kali mengurangi populasi peserta didik di lembaga pendidikan di pedesaan. LP Ma'arif yang banyak tersebar di daerah pedesaan harus mencari strategi untuk mempertahankan relevansi mereka di tengah urbanisasi.

2. Tantangan Eksternal

Faktor eksternal juga mempengaruhi kemampuan LP Ma'arif untuk menghadapi perubahan sosial.

- a) Peraturan Pemerintah, Kebijakan pemerintah yang tidak selalu sejalan dengan visi dan misi LP Ma'arif dapat menjadi hambatan. Misalnya, standar pendidikan nasional yang terlalu berorientasi pada akademik sering kali mengabaikan aspek spiritual dan karakter.
- b) Minimnya Dukungan dari Pemangku Kepentingan, LP Ma'arif sering kali tidak mendapatkan dukungan optimal dari pemerintah, swasta, atau masyarakat luas dalam bentuk pendanaan, kebijakan, dan strategi kerjasama.
- c) Ketimpangan Ekonomi, Ketimpangan ekonomi di Indonesia membuat beberapa wilayah memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas. LP Ma'arif di daerah miskin sering kali berjuang mempertahankan operasional mereka.
- d) Kompetisi dengan Lembaga Non-Tradisional, Munculnya lembaga pendidikan berbasis teknologi dan sekolah-sekolah internasional menjadi pesaing berat bagi LP Ma'arif, terutama di daerah perkotaan.

3. Tantangan Internal

Selain tantangan eksternal, LP Ma'arif juga menghadapi tantangan internal yang dapat menghambat adaptasi mereka terhadap perubahan sosial.

- a) Keterbatasan Anggaran, LP Ma'arif sering kali menghadapi kendala finansial, terutama di daerah-daerah dengan basis ekonomi yang lemah. Keterbatasan dana ini berdampak pada penyediaan fasilitas belajar, pelatihan guru, dan pengembangan program pendidikan yang inovatif.
- b) Kurangnya Tenaga Pendidik Berkualitas, Salah satu hambatan besar adalah keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi tinggi. Banyak guru di LP Ma'arif tidak mendapatkan pelatihan lanjutan yang memadai untuk menghadapi perubahan kebutuhan pendidikan.
- c) Dualisme Kurikulum, LP Ma'arif menghadapi dilema dalam mengintegrasikan kurikulum nasional dengan pendidikan berbasis nilai-nilai Aswaja. Kekacauan ini sering kali membuat siswa kurang kompetitif dalam mata pelajaran umum yang diujikan secara nasional.

4. Tantangan Ideologis dan Budaya

Sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam tradisional, LP Ma'arif menghadapi tantangan ideologi dan budaya dalam menjaga relevansinya di era modern.

- a) Radikalisme dan Intoleransi, LP Ma'arif harus menghadapi tantangan dalam menangkal pengaruh radikalisme dan intoleransi yang dapat merusak semangat keberagaman dan nilai-nilai Aswaja yang mereka perjuangkan.



- b) Transformasi Nilai Budaya, Modernisasi sering kali membawa pergeseran nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam tradisional. LP Ma'arif perlu memastikan bahwa siswa mereka tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal.
 - c) Stigma terhadap Pendidikan Tradisional, LP Ma'arif sering kali dianggap kurang progresif dibandingkan dengan lembaga pendidikan modern lainnya. Stigma ini menjadi hambatan dalam menarik minat siswa dan dukungan masyarakat.
5. Solusi dan Strategi Menghadapi Tantangan

Meskipun tantangan dan hambatan yang dihadapi LP Ma'arif cukup besar, ada berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya:

- a) Inovasi dalam Teknologi Pendidikan, LP Ma'arif dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti e-learning, media sosial, dan aplikasi pendidikan. Pengadaan pelatihan bagi guru dalam penggunaan teknologi juga sangat penting.
- b) Diversifikasi Kurikulum, Mengintegrasikan kurikulum nasional dengan keterampilan hidup, kewirausahaan, dan teknologi akan membantu siswa LP Ma'arif bersaing di era modern tanpa kehilangan akar keagamaan mereka.
- c) Penguatan Kerjasama dengan Pemerintah dan Swasta, LP Ma'arif perlu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dukungan finansial, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur.
- d) Penguatan Ideologi Aswaja, LP Ma'arif perlu menanamkan nilai-nilai Islam moderat yang sesuai dengan ajaran Aswaja secara mendalam kepada siswa, agar mereka menjadi agen perubahan sosial yang toleran dan inklusif.
- e) Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik, Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga pendidik akan meningkatkan kualitas pembelajaran di LP Ma'arif. Selain itu, insentif yang layak bagi guru juga dapat membantu meningkatkan motivasi mereka.
- f) Kampanye Kesadaran Pendidikan, LP Ma'arif perlu menggalakkan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan di kalangan masyarakat, terutama di daerah terpencil.
- g) Lembaga Reformasi Manajemen, Peningkatan profesionalisme dalam lembaga pengelolaan, termasuk transparansi keuangan dan pengelolaan sumber daya, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas LP Ma'arif.

KESIMPULAN

Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam besar di Indonesia, telah memberi kontribusi signifikan terhadap pendidikan melalui berbagai lembaga seperti pesantren, madrasah, dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU (LP Ma'arif NU). Organisasi ini didirikan pada tahun 1926 dan sejak saat itu berakar kuat di tengah masyarakat. Pendidikan NU didasarkan pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah dan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa serta mengembangkan individu yang berakhlak mulia, NU memiliki tiga pilar utama: wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan, dan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan pilar-pilar ini, NU



mendirikan LP Ma'arif NU, yang bertanggung jawab atas pendidikan formal dan non-formal di luar pesantren. Sementara itu, pesantren di bawah NU didukung oleh Rabithah Ma'ahid al-Islam (RMI). Meskipun perannya signifikan, lembaga pendidikan NU menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, yang menghambat adaptasi mereka terhadap perubahan sosial dan modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, A., Habibi, D. D., Muslim, B., Firdaus, P., & Rahmawati, D. (2025). *Pendidikan Karakter*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abrori, M. S., Mispani, M., Setiawan, D., & Khodijah, K. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) Dalam Pembelajaran Ke-NU-An di MTS Darussalam Kademangan Blitar. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(1), 45-58.
- Afif, N., Zamzami, M. A., Mukhtarom, A., & Qowim, A. N. (2022). Strategi Lembaga Pendidikan MA'ARIF NU Pusat Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi. *Tadarus Tarbawy: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 4(2).
- Anisyah, N., Marwah, S., & Yumarni, V. (2023). Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Akhlak Anak Pra Sekolah. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 287–295. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.164>
- Dianita, G., Firdaus, E., & Anwar, S. (2019). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN TOLERANSI DI SEKOLAH: Sebuah Kearifan Lokal di Sekolah Nahdlatul Ulama. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 5(2), 162. <https://doi.org/10.17509/t.v5i2.16752>
- Fathih, M. A., & Amrullah, A. M. K. (2022). Model Pengelolaan dan Problematika di Lembaga Madrasah Ma'arif NU. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies*, 1(2), 9–15. <https://doi.org/10.69966/mjemias.v1i2.13>
- Hawari, A. Y., Suwaryo, U., & Kartini, D. S. (2023). Perbandingan Peran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.18196/jpk.v5i1.19187>
- Jesika, W., Rahman, A., & Oktori, A. R. (2025). *Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Teks Mata Pelajaran Akidah Ahlak Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP).
- Mawasti, W., & Adli, E. N. (2018). Perumusan Visi Organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (Ipnu) Tahun 1954. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 8(1), 53–78. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v8i1.117>



- Nasrullah, N., Rama, B., & Achruh, A. (2023). Nahdlatul Ulama, Tokoh Dan Kegiatannya Dalam Dunia Pendidikan. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(1), 21-28.
- Rozi, A. F. (2025). *Wawasan Kenegaraan Dan Kebangsaan*. 02(01), 105–115.
- Saefudin, A. (2021). *Pendidikan Karakter dalam Perspektif KH. Wahid Hasyim* (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Syarif, J., Tarbiyah, F., & Keguruan, D. (2015). *Dinamika Lembaga Pendidikan Ma'arif Nu dalam Sistem Pendidikan Nasional*.
- Ulum, M., & Wahid, A. (2019). FIKIH ORGANISASI (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia). *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 54–75. <https://doi.org/10.35309/alinsiyroh.v5i2.3517>
- Yugo, T. Y. (2025). Pendidikan Karakter Berbasis Aswaja Nahdlatul Ulama di Era Disrupsi: Antara Tantangan dan Inovasi. *NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies*, 3(1), 510–536. <https://doi.org/10.63875/nahnu.v3i1.70>

